

Abstract dan Executive Summary
LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING



**POLA RELASI AKTOR DAN MODEL KEBIJAKAN PENYELESAIAN
KONFLIK TANAH PERKEBUNAN
(Studi Kasus Di Kabupaten Jember)**

Oleh:

Muhammad Hadi Makmur, S.Sos, MAP /0007107402 (Ketua)

Linda Dwi Eriyanti, S.Sos, MA /0010087712 (Anggota)

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
Desember 2016**

POLA RELASI AKTOR DAN MODEL KEBIJAKAN PENYELESAIAN KONFLIK
TANAH PERKEBUNAN (Studi Kasus Di Kabupaten Jember)

Peneliti : Muhammad Hadi Makmur, Linda Dwi Eriyanti
Mahasiswa yang terlibat : Fajri Maulana, Andi
Sumberdana : DIPA BOPTN
Kontak Email : makmur.unej@gmail.com

Abstrak

Masalah pertanahan adalah masalah relasional manusia dengan tanah, yang terkandung didalamnya dinamika hubungan sosial, ekonomi, dan politik, yang seringkali memunculkan perselisihan dan konflik. Jember sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki wilayah perkebunan cukup luas, juga tidak terlepas dari kasus konflik tanah. Konflik tersebut melibatkan beberapa pihak, seperti masyarakat petani, PTPN dan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP). Eskalasi konflik terjadi secara dinamis pasang surut antara warga petani dai tanah ketajek, pengusaha dan pemerintah/aparat. Beberapa faktor yang memicu atau pendorong konflik atas tanah ketajek adalah, pembatalan secara sepihak kesempatan dengan warga oleh pihak pengusaha dan pemerintah, tumpang tindihnya serta tafsir yang berbeda atas peraturan yang ada antara para pihak, konflik secara manifes terjadi jika muncul intimidasi pada warga, adanya ketiakpusan sebagian warga atas keputusan pemerintah dengan kelompok warga lain, yang menganggap tidak ada transparansi dalam proses verifikasi. Dalam memperjuangkan kepentingan atas perselisihan tanah masing-masing aktor menggunakan strategi, baik lobi atau negosiasi, kekerasan dan mobilisasi, maupun melalui jalur hukum. Ada empat dimensi dalam cakupan kebijakan penyelesaian konflik tanah perkebunan, yaitu dmensi struktural, kultural, pelaku aktor dan relasional

Kata kunci: kebijakan; relasi aktor, konflik tanah; penyelesaian konflik

Executive Summary

POLA RELASI AKTOR DAN MODEL KEBIJAKAN PENYELESAIAN KONFLIK TANAH PERKEBUNAN (Studi Kasus Di Kabupaten Jember)

Peneliti : Muhammad Hadi Makmur¹, Linda Dwi Eriyanti²
Mahasiswa yang terlibat : Fajri Maulana³, Andi⁴
Sumberdana : DIPA BOPTN
Kontak Email : makmur.unej@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dinamika kasus konflik tanah di Indonesia masih tinggi dan cenderung mengalami peningkatan. Dari banyak titik konflik tanah, wilayah perkebunan merupakan titik konflik terbanyak. Jember sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki wilayah perkebunan cukup luas, juga tidak terlepas dari kasus konflik tanah. Sampai akhir tahun 2013 menunjukkan setidaknya ada 35.067,9 hektar tanah yang menjadi konflik, yang tersebar pada 17 desa di 7 kecamatan. Area tanah yang menjadi konflik berada pada wilayah perkebunan dan kehutanan. Konflik tersebut melibatkan beberapa pihak, seperti masyarakat petani, PTPN dan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP).

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah secara diakronik bentuk konflik tanah di wilayah perkebunan?
2. Faktor apa saja yang menjadi pemicu konflik tanah di wilayah perkebunan?
3. Siapa saja aktor-aktor yang terlibat, apa motif dan bagaimana strategi aktor dalam mempengaruhi proses penyelesaian konflik tanah di wilayah perkebunan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, meskipun data yang dipergunakan juga dapat bersifat kuantitatif, maka analisis yang digunakan adalah dengan cara melakukan interpretasi terhadap data, fakta dan informasi yang telah dikumpulkan melalui pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar

¹ Prodi Administrasi Negara, Jurusan Administrasi FISIP Universitas Jember

² Jurusan HI, FISIP Universitas Jember

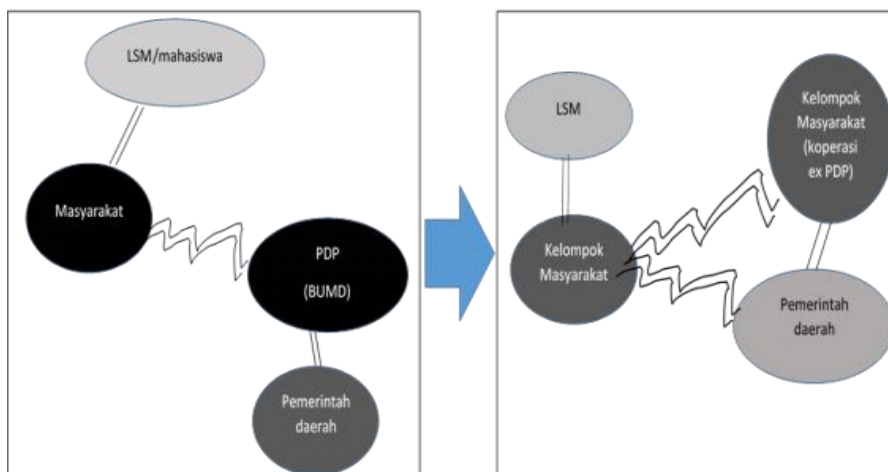
³ Prodi Administrasi Negara, Jurusan Administrasi FISIP Universitas Jember

⁴ Prodi Administrasi Negara, Jurusan Administrasi FISIP Universitas Jember

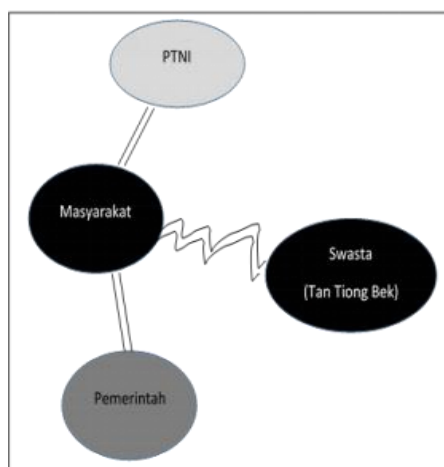
pengalaman dan temuan empiris. Metode untuk memperoleh data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. yaitu Bupati dan DPRD, Kepala badan pertanahan Jember, Manajer Perusahaan Daerah Perkebunan Jember, Aparat keamanan, Aparat desa, tokoh serta kelompok masyarakat, LSM yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan kasus konflik pertanahan, juga Ahli terkait konflik dan masalah tanah atau agraria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

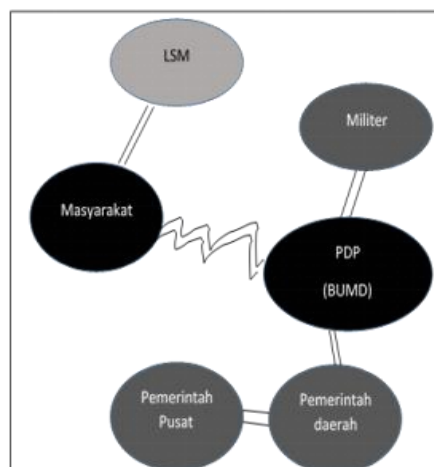
Dari hasil peneliti diperoleh gambaran bahwa Secara diakronik konflik yang terjadi dalam kasus tanah ketajak dapat dibagi dalam tiga periode, orde lama, orde baru dan orde baru. Dengan eskalasi konflik secara dinamis pasang surut antara warga petani dai tanah ketajak, pengusaha dan pemerintah/aparat.



Gambar Relasi Aktor Era Reformasi

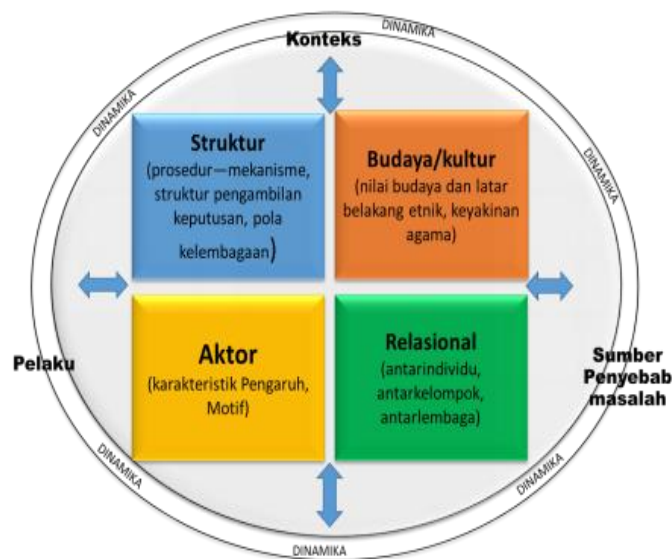


Gambar. Relasi Aktor Era Orla



Gambar. Relasi Aktor Era Orba

Beberapa faktor yang memicu atau pendorong konflik atas tanah ketajek adalah, pembatalan secara sepihak kesempatan dengan warga oleh pihak pengusaha dan pemerintah, tumpang tindihnya serta tafsir yang berbeda atas peraturan yang ada antara para pihak, konflik secara manifes terjadi jika muncul intimidasi pada warga, adanya ketiakpulan sebagian warga atas keputusan pemerintah dengan kelompok warga lain, yang menganggap tidak ada transparansi dalam proses verifikasi. Dalam memperjuangkan kepentingan atas perselisihan tanah masing-masing aktor menggunakan strategi, baik lobi atau negosiasi, kekerasan dan mobilisasi, maupun melalui jalur hukum. Ada empat dimensi dalam cakupan kebijakan penyelesaian konflik tanah perkebunan, yaitu dimensi struktural, kultural, pelaku aktor dan relasional



Gambar: Dinamika dan Dimensi Kebijakan Penyelesaian konflik di daerah Perkebunan

KESIMPULAN

Secara diakronik konflik yang terjadi dalam kasus tanah ketajek dapat dibagi dalam tiga periode, orde lama, orde baru dan orde baru. Dengan eskalasi konflik secara dinamis pasang surut antara warga petani dai tanah ketajek, pengusaha dan pemerintah/aparat. Beberapa faktor yang memicu atau pendorong konflik atas

tanah ketajek adalah, pembatalan secara sepihak kesempatan dengan warga oleh pihak pengusaha dan pemerintah, tumpang tindihnya serta tafsir yang berbeda atas peraturan yang ada antara para pihak, konflik secara manifes terjadi jika muncul intimidasi pada warga, adanya ketiakpusan sebagian warga atas keputusan pemerintah dengan kelompok warga lain, yang menganggap tidak ada transparansi dalam proses verifikasi. Dalam memperjuangkan kepentingan atas perselisihan tanah masing-masing aktor menggunakan strategi, baik lobi atau negosiasi, kekerasan dan mobilisasi, maupun melalui jalur hukum. Maka ada beberapa hal yang peneliti sarankan, yaitu Untuk mengantisipasi adanya konflik ulang secara eskalatif besar, beberapa hal yang memicu konflik agar di selesaikan, khususnya menghindari konflik antar kelompok, sehingga perlu ditempuh jalur persuasif musyawarah yang bisa mengakomodasi kepentingan warga yang belum mendapat rasa keadilan. Perlunya selanjutnya ditemukan model terbaik dan menyelesaikan konflik ini secara fundamental, khususnya dalam hal pengelolaan aset perusahaan daerah yang didevestasikan pengelolaannya pada koperasi agar lebih transparan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan memicu konflik baru

KATA KUNCI Kebijakan; Kebijakan; Relasi Aktor, Konflik Tanah; Penyelesaian Konflik

REFERENSI

BPS, 2013, Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013, BPS, Jakarta

D.Bayu Lukito dan Bambang T Prastyo, Pemetaan Partisipatif: Panduan Penyelesaian Konflik dan Sengketa Agraria Di Jember, di unduh dari <http://www.jkpp.org/downloads/05.%20jember.pdf> (5 april 2014)

Endriatmo Soetarto, 2009, Kata Sambutan sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dalam Gunawan Wiradi, 2009, Seluk Beluk Masalah Agraria; reforma Agraria dan Penelitian Agraria, STPN Press-Sayogyo Institut, Yogyakarta; v-ix

- Gunawan Wiradi, 2009, *Seluk Beluk Masalah Agraria; reforma Agraria dan Penelitian Agraria*, STPN Press-Sayogyo Institut, Yogyakarta; v-ix
- Konflik Tanah di Jember tak pengaruhi investasi, di unduh dari http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/176828/Konflik_Tanah_di_Jember_Tak_Pengaruhi_Investasi.html#.U1dVgXb5Sn4 (20 maret 2013)
- KPA, 2013, “Warisan Buruk Masalah Agraria Di Bawah Kekuasaan SBY”, Laporan Akhir Tahun 2013 Konsorsium Pembaruan Agraria1, KPA, Jakarta
- , 2012, “Terkuburnya Keadilan Agraria Bagi Rakyat Melalui Reforma Agraria” Laporan Akhir Tahun 2012, Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA, Jakarta
- , 2011, “Tahun Perampasan Tanah Dan Kekerasan Terhadap Rakyat”, Laporan Akhir Tahun 2011 Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA, Jakarta
- , 2010, “Tidak Ada Komitmen Politik Pemerintah Untuk Pelaksanaan Reforma Agraria”, Laporan Akhir Tahun 2010 Konsorsium pembaruan agraria, KPA, Jakarta
- , 2009, Laporan Akhir Tahun 2009 Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA, Jakarta
- Lounela, Anu dan Zakaria, R Yando (eds). 2002. *Berebut Tanah; Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*. Insist dan Jurnal Antropologi Indonesia Universitas Indonesia, Yogyakarta
- M Hadi Makmur, 2009, Relasi Kekuasaan dalam Kebijakan Pemanfaatan Ruang, *Jurnal Sosial-Budaya dan Politik*, Vol VIII, No.1, Mei 2009: 955-972
- Masalah Agraria di Bawah Kekuasaan SBY di unduh http://www.kpa.or.id/wpcontent/uploads/2011/11/Laporan-Akhir-Tahun-2013-KPA_finalrelease-19-Des.pdf (1 april 2014)
- Sugiyono.2008 *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, Bandung, CV Alfabeta, hlm. 218